

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Empirik

Untuk memahami perilaku pemilih pada pemilukada Kabupaten Sikka tahun 2018, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Vera Haryani Nasution (2009) dengan judul “Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera utara secara langsung dan faktor-faktor apa yang mengetahuinya. Pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana datanya bersumber dari data primer dan data skunder dengan teknik observasi, angket dan studi pustaka.

Dalam pemilukada secara langsung tersebut, masyarakat tidak terpengaruh oleh isu suku, agama, ras dan politik uang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilukada secara langsung Di Kabupaten Labuhan Batu, Kelurahan Bakaran Batu memperlihatkan hubungan yang cukup erat antara orientasi kandidat, orientasi isu dan perilaku pemilih.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat korelasi yang jelas dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Dalam Pilkada Kabupaten Sikka” dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana bagaimana perilaku memilih masyarakat di Desa Baomekot pada pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018. Korelasi dari kedua penelitian ini adalah peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya sama-sama mengkaji perilaku pemilih pada pilkada. Walaupun pada dasarnya memiliki perbedaan dalam lokasi penelitian yakni penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara sedangkan dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Indah Gayatri Abidano (2013) dengan judul “factor-faktor yang mempengaruhi pemilih tidak menggunakan hak pilih pada PILWALKOT kota kupang 2012” dengan tujuan untuk melihat tingkat partisipasi pemilih terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kusioner dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Sikumana memiliki pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena dipengaruhi

oleh faktor politis, faktor pribadi dan faktor administratif. Kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Sikumana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017 tidak hanya karena sikap pribadi saja, namun juga karena ketidakstabilannya pihak pemerintah dalam menyikapi aspirasi rakyat, penetapan PILWALKOT yang masih minim dalam melayani dan pendataan penduduk yang kurang maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat korelasi yang jelas dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Dalam Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2018” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perilaku memilih masyarakat di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang dalam pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018. Korelasi dari kedua penelitian ini adalah penelitian sekarang dan peneliti sebelumnya sama-sama mengkaji kecenderungan pemilih dalam pilkada. Walaupun pada dasarnya juga terjadi perbedaan dalam menentukan permasalahan yakni peneliti sebelumnya lebih menfokuskan penelitiannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih tidak menggunakan hak pilih pada PILWALKOT Kota Kupang 2012 pada Kelurahan Sikumana Kota Kupang sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan perhatian terhadap perilaku pemilih pada pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018 di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka.

3. Dwidyawati Ester Mopeng (2017) dengan judul Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara periode (2016-2021) dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana perilaku politik masyarakat Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan kecenderungan masyarakat desa Sawangan kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara berdasarkan pendekatan faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kassus dimana datanya bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi perilaku memilih di desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara adalah pemilih tidak melihat lagi dari partai mana yang menjadi kendaraan kandidat menuju kekuasaan. Partai besar, kecil maupun independen, yang dilihat dari pemilih adalah figur dari kandidat tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan dalam suatu partai sehingga pemilih hanya fokus melihat pada figur yang dijadikan sosok idola.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwidyawati Ester Mopeng, penulis berasumsi bahwa untuk memperoleh kemenangan di desa Sawangan

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, pasangan calon kepala daerah harus benar-benar terjun langsung ke masyarakat untuk bertatap muka dan mengenali lebih dalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena pada dasarnya pemilih lebih melihat figur atau kepribadian yang dimiliki oleh pasangan calon tanpa melihat besar atau kecilnya partai yang menjadi kendaraan politiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat korelasi yang jelas dengan penelitian ini yang berjudul Analisis Perilaku Memilih Masyarakat di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang dalam Pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018 dengan rumusan masalah Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Baomekot pada pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018. Korelasi dari kedua penelitian ini adalah peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya sama-sama mengkaji kecenderungan pemilih pada pilkada. Walaupun pada dasarnya juga terjadi perbedaan dalam menentukan permasalahan yakni penelitian sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya terhadap apa yang mendorong pemilih desa Sawangan kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara untuk menentukan pilihannya pada pemilihan kepala daerah Minahaa Utara 2016-2021 sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan perhatian terhadap perilaku memilih masyarakat di desa Baomekot kecamatan Hewokloang dalam pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018.

2.2 Landasa teori

Bagian ini merupakan unsur yang paling vital dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti akan menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya.

Teori menurut Masri Singaribun dan Soflan Effendi dalam buku *Metode Penelitian Sosial* (1998) mengatakan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan presepsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

2.2.1 Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2010:169) Dalam melakukan kajian perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni :

a. Individu aktor politik

Meliputi aktor politik (pemimpin), aktivitas politik dan warga negara biasa.

b. Agregasi politik

Yang dimaksudkan dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa.

c. Tipologi Kepibradian Politik

Tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelis dan demokrat.

Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologi disamping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Menurut model ini, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik, Ramlan Surbakti (2010:169-170).

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor contohnya keluarga, agama, sekolah dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.
- c. Struktur kepribadian, hal ini tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri.

Artinya, penilaian terhadap suatu objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dari eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi dengan aggressor.

- d. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti kondisi cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

2.2.2 Partisipasi Politik

Dalam teori kontemporer, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, Samuel P. Huntington (1990).

Menurut Ramlan Surbakti (2010:184) pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik? faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. *Partisipasi aktif*, yang termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik.

- b. *Partisipasi Pasif*, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis (golput).

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti (2010:182-183) adalah sebagai berikut:

- 1. Apatis

Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

- 2. Spektor

Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

- 3. Gladiator

Artinya, mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

- 4. Pengkritik

Artinya, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

2.2.3 Kampanye Politik

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah *“kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”*.

Rogers dan Storey (1987:87) sebagaimana Efriza (2012), mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kampanye adalah sebuah tindakan doktrinasi yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur semua jenis dan bentuk kampanye.

Ada 9 jenis kampanye yaitu:

1. Pertemuan terbatas
2. Tatap muka dan dialog

3. Penyebaran melalui media cetak dan elektronik
4. Penyiaran melalui radio dan televisi
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Rapat umum
8. Debat publik/debat terbuka antar calon
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

2.2.4 Pemilih

Menurut Joko J. Prihatmoko (2006:46) pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakin agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilihan dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai hak memilih menurut pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Telah berusia 17 tahun
- b. Terdaftar sebagai pemilih
- c. Tidak sedang terganggu jiwa

- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Firmanzah (2007:134), perilaku pemilih diklarifikasi dalam empat jenis. Adapun empat jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilih Rasional

Pemilih rasional adalah jenis pemilih yang memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-problem-solving* dan berorientasi rendah untuk faktor *ideology*. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan pemilu dengan program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seseorang kontestan. Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama.

Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ini menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain. Pemilih jenis ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau seorang kontestan ke partai atau kontestan lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu:

- a. Jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan.
- b. Bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

3. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini memiliki orientasi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang sangat rendah sekali. Walaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak.

Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ini kearah perbaikan yang mereka harapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan.

4. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini tidak terlalu melihat kebijakan partai atau kontestan pemilu sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

2.2.5 Perilaku Pemilih

Perilaku memilih adalah “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not not vote*) didalam suatu pemilihan umum. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih/mendukung kandidat tertentu “Ramlan Surbakti (1997:170).

Secara garis besar, ada tiga model atau mazhab (*school of thought*) yang digunakan dalam studi perilaku memilih, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional atau model ekonomi-politik. Model terakhir juga dikenal dengan nama model pilihan rasional. Berikut ini akan diuraikan masing-masing asumsi dan faktor-faktor yang ditawarkan ketiga model tersebut.

1. Model Sosiologis

Penjelasan perilaku memilih dengan menggunakan analisis sosiologis pertama kali dikembangkan oleh sarjana Universitas Columbia sehingga pendekatan ini dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberin suara dalam pemilu.

Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks

paling awal dari pendekatan ini, yaitu status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Dieter Roth (2009:24-25).

Namun, ada juga yang menyertakan beberapa faktor lain yang dianggap penting untuk diuji. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, contohnya menyebutkan faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat religiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu, Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2012:6-21). Namun, berdasarkan perbandingan hasil beberapa survei yang mencakup pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden sejak tahun 1999 sampai dengan 2004, mereka menyimpulkan bahwa faktor-faktor sosiologis tidak begitu signifikan lagi terhadap perilaku memilih di Indonesia, Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2012: 454-461). Sebelumnya, William Liddle dan Saiful Mujani, dengan membandingkan empat survei opini publik yang dilakukan pada Pemilu 1999 dan 2004 serta Pilpres 2004 putaran pertama dan kedua juga menyimpulkan hal yang sama, Saiful Mujani dan William R. Liddle (2007: 850-851).

Dwight King dan Anies Baswedan mempunyai kesimpulan berbeda dengan Liddle dan Mujani. Dengan membandingkan hasil dua

pemilu yang berbeda, baik Dwight King maupun Anies Baswedan menyimpulkan bahwa faktor orientasi keagamaan atau lebih spesifik lagi politik aliran masih relevan dalam menentukan pilihan pemilih di Indonesia. Dwight King yang membandingkan hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 menyimpulkan bahwa ada pembelahan yang kurang-lebih sama pada kedua pemilu tersebut antara partai-partai dengan aliran politik santri dan abangan dan pembelahan antara santri modernis dan tradisionalis. Sementara itu, berdasarkan perbandingan basis pemilih menurut kabupaten/kota pada Pemilu 1999 dan 2004, Anies Baswedan menyimpulkan adanya korelasi yang signifikan antara basis pemilih baik partai-partai Islam, nasionalis, maupun Kristen.

Kajian mengenai perilaku memilih di Indonesia yang menggunakan penekatan sosiologis dikenalkan pertama kali oleh Afan Gaffar. Dalam buku *Javanise Voters*, ia menunjukkan adanya kecenderungan perilaku pemilih atau preferensi politik sosio religius maupun sosio personal. Sosio religius sendiri melihat bahwa partisipasi politik dan perilaku memilih lebih didasarkan pada konteks politik aliran sedangkan yang sosio personal menitikberatkan pada konteks bapakisme berdasarkan pada hubungan paternalistik.

2. Model Psikologis

Ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis, yang pertama kali dikenalkan oleh sarjana Ilmu Politik dari Universitas

Michigan, yaitu: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau *partisanship*. Menurut pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan struktur sosial, sebagaimana dianalisis oleh pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), melainkan faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih, Dieter Roth (2009: 37).

Orientasi terhadap isu atau tema merupakan konseptualisasi pengaruh jangka pendek yang diperkenalkan oleh pendekatan psikologis. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilih apabila memenuhi tiga persyaratan berikut ini: (1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif, Dieter Roth (2009: 40).

Sejak tahun 1970-an, isu dalam studi pemilu dibedakan menjadi dua, yaitu *position issues* dan *valence issues*. *Position issues* merupakan isu dimana masing-masing kelompok atau partai mewakili posisi dan memiliki tujuan yang bukan hanya berbeda, tetapi juga bertentangan. Salah satu contoh isu seperti ini adalah soal aborsi, yaitu antara kelompok *pro-life* dan *pro-choice*. Sementara itu, *valence issues* tidak menyangkut perbedaan tujuan, melainkan hanya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, semua partai pasti sepakat

untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga, termasuk buruh, tetapi masing-masing partai akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan tersebut dicapai. Dalam konteks pemilu, *position issues* lebih mempengaruhi keputusan para pemilih. Meskipun demikian, biasanya *position issues* lebih jarang muncul, karena dihindari oleh partai politik, terutama karena isu semacam ini memiliki resiko menimbulkan polarisasi, bahkan di kalangan pengikutnya sendiri, Dieter Roth (2009: 41).

Partisanship atau *party identification* (*Parti ID*) dapat digambarkan sebagai “keanggotaan” psikologis, dimana identifikasi terhadap sebuah partai tidak selalu bersamaan dengan keanggotaan resmi pemilih dengan partai tersebut. *Party ID* lebih sebagai orientasi afektif terhadap partai. PI merupakan orientasi individu terhadap partai tertentu yang bersifat permanen, yang bertahan dari pemilu ke pemilu. *Party ID* masih dapat mengalami perubahan, jika terjadi perubahan pribadi yang besar atau situasi politik yang luar biasa, Dieter Roth (2009: 38).

Liddle dan koleganya, Mujani dan Ambardi, termasuk yang berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa, maupun kelas, Saiful Mujani dan William R. Liddle (2007: 839-850).

3. Model Pilihan Rasional

Menurunnya pengaruh kelas dan agama dalam politik telah mendorong para pengkaji perilaku memilih menemukan penjelasan selain pemisahan sosiologis, yang kemudian mendorong semakin mengemukanya faktor ekonomi, kepribadian, isu dan media. Ada pergeseran dalam studi perilaku memilih ke model yang lebih menekankan individu warga negara sebagai aktor yang relatif mandiri dari partai dan struktur kolektif serta ikatan kesetiaan lainnya, Ola Listhaug (2005:214).

Teori pilihan rasional (*rational-choice*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Anthony Downs sebenarnya tidak hanya sebatas pada studi pemilu. Ia menulis bagaimana demokrasi “diukur” dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi, Dieter Roth (2009:38). Salah satu elemen kunci dalam teori ekonomi Downs dan para penerusnya tentang demokrasi adalah bahwa arena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, pemilihan rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilihan, partai mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapat pemerintah, kekuasaan dan gengsi.

Partai dan para politisi pada dasarnya adalah pencari kekuasaan, yang tujuannya mendapatkan dukungan suara setidaknya untuk ikut terlibat

dalam pemerintahan. Partai yang sedang berkuasa akan memaksimalkan dukungan pemilih agar terpilih kembali, sedangkan partai oposisi bertujuan memaksimalkan dukungan untuk mengganti pemerintah yang ada. Bagi partai dan para politisi, fungsi sosial, seperti mengelola pemerintahan dengan efektif atau meningkatkan standar hidup warga, adalah akibat atau hasil dari tindakan rasional mereka (*by product*) dan bukan menjadi tujuan mereka, Jocelyn A.J Evans (2004:72-73).

Teori ini dibangun dengan dari kombinasi teori-teori aksi sosial dan teori ekonomi tentang rasionalitas. Downs mendefinisikan rasionalitas sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling reasonable. Definisi ini “diturunkan” dari teori ekonomi dimana cara yang paling reasonable adalah cara dimana seseorang, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimilikinya, mewujudkan tujuannya dengan menggunakan input sumber daya yang paling sedikit. Dengan kata lain, seorang individu yang rasional tertarik terhadap cara yang biayanya paling efektif dalam memaksimalkan apa yang ia peroleh. Downs menyebutnya sebagai *utility maximization*, Dieter Roth (2009:49).

Dalam konteks pemilu, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih, teori yang menempatkan individu, dan bukan

lingkungan yang ada disekitar individu, sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif.

Downs menyusun lima kriteria rasionalitas yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan dapat dikatakan sebagai pilihan rasional, Jocelyn A.J Evans (2004:71), yaitu (a) individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada serangkaian alternatif pilhan; (b) individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara beruntun; (c) susunan preferensi tersebut bersifat transitif, contoh individu lebih memilih alternatif 1 dari pada alternatif 2, lebih memilih alternatif 2 dari pada alternatif 3, dan seterusnya dengan konsekuensi bahwa pilihan 1 lebih diutamakan dari pilihan-pilihan berikutnya; (d) individu akan selalu memilih alternatif yang ia merasakan paling dekat (utama); dan (e) jika dihadapkan pada berbagai pilihan di waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama.

Kriteria teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah *outcome*, bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan *outcome*, dan mempunyai seperangkat kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda guna menjamin dipilihnya sebuah alternatif setiap waktu. Artinya, individu diasumsikan mempunyai informasi yang memungkinkannya membuat pilihan tersebut, Joecelyn A.J. Evans (2004:72).

Kebutuhan terhadap informasi yang lengkap inilah merupakan salah satu permasalahan dari teori ini. Jika informasi yang tersedia cukup lengkap, maka alternatif-alternatif pilihan lebih mudah dirumuskan dan ditimbang untuk dipilih. Dalam pemilihan, informasi tersebut akan mengantarkan pemilih pada perbandingan keuntungan yang bisa diberikan oleh masing-masing partai atau kandidat jika mereka berkuasa. Namun, kenyataan informasi yang lengkap jarang dimiliki oleh pemilih. Karena itu, pemilih umumnya harus mengambil keputusan ditengah “ketidaktahuan”, Dieter Roth (2009:50). Jadi, saat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebelumnya, misalnya, pemilih bisa saja tidak mempunyai pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dan alternatif lain bagi tindakan tersebut.

Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan pemilih untuk membatasi ketidaktahuan ini. *Pertama*, ia hanya mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang yang menurutnya paling penting sehingga pengeluaran yang harus ia tanggung dapat dibatasi dan tidak melampaui kegunaan dari informasi tersebut. *Kedua*, ia menggunakan kerja dari pihak lain, seperti partai, media, kelompok kepentingan dan sebagainya yang mengumpulkan, memilih, menganalisis dan menyampaikan informasi. Dalam konteks ini, pemilih melimpahkan sebagian beban pengeluaran untuk memperoleh informasi kepada pihak lain, Dieter Roth (2009:50).

Berdasarkan informasi yang dimiliki pemilih, Downs membagi mereka menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Pemilih Agigator, yang mempunyai informasi dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih dengan cara yang sama dengan dirinya.
2. Pemilih pasif, yang menggunakan informasi untuk dirinya sendiri.
3. Pemilih yang belum jelas pilihannya, karena tidak mempunyai informasi yang memadai.
4. Pemilih loyalis, yang menggunakan informasi pada pemilu sebelumnya untuk memilih. Pemilih loyalis tetap dengan pilihan lamanya selama utilitas yang ia peroleh tidak berubah menjadi lebih buruk, Jocelyn A.J. Evans (2004:76).

Tentang pemberian suara (voting), Downs memberikan batasan bahwa rational voting hanya menunjuk pada pilihan yang didasarkan pada motivasi ekonomi dan politik. Beberapa isu ekonomi yang paling penting, antara lain pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi. Keputusan yang didorong oleh ketakutan, misalnya yang disebabkan oleh tekanan keluarga, dorongan untuk ikut-ikutan orang disekitarnya, atau klientelisme tidak dapat dikategorikan sebagai rational voting. Hal paling penting yang harus dicatat dari teori rational voting adalah bahwa pemberian suara dalam pemilu (voting) memberikan kontribusi bagi outcome kolektif, dari pada

mempengaruhi pemilu semata-mata sebagai individu, Jocelyn A.J Evans (2004:4).

2.2.6 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilukada merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpinnya di daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada orde baru. Kelahiran pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

Menurut Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin (2002:61), proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peranan yang sangat penting dibidang penyelenggaraan pemerintahan,

pengembangan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 dan Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilukada tercermin dalam cara pemilihan dan asa-asa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilukada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Menurut Joko J. Prihatmo (2005:1-2), dipilihnya sistem pemilukada mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pemilukada dirasa sebagai pengejawantahan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan Pemilukada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntunan rakyat sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya Pemilukada merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan oleh daerah. Dengan pemilukada, yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pemilukada layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis.

2.2.7 Parameter Demokrasi Pemilukada

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978), parameter untuk mengamati terwujudnya suatu pemilihan yang demokratis apabila:

a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang di selenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil.

b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa di pegang terus-menerus oleh seseorang seperti dalam sistem pemerintahan monarki. Artinya, kalau seseorang berkuasa terus-menerus atau suatu partai politik mengendalikan roda

pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu kurang layak disebut demokratis.

c. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti kepala daerah sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah di sepakati.

d. Akuntabilitas publik

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Hal itu karena pejabat merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab terhadap amanah tersebut.

Selain itu pemilu dapat juga disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipil, yakni menyelenggarakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni langsung, umum, bebas, jujur dan adil (Luber dan Jurdil)

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pemilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilukada diharuskan setiap aparat pemerintah, calon/peserta pemilukada, pengawas pemilukada, pemantau pemilukada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilukada, setiap pemilih dan calon/peserta pemilukada mendapat perlakuan yang sama.

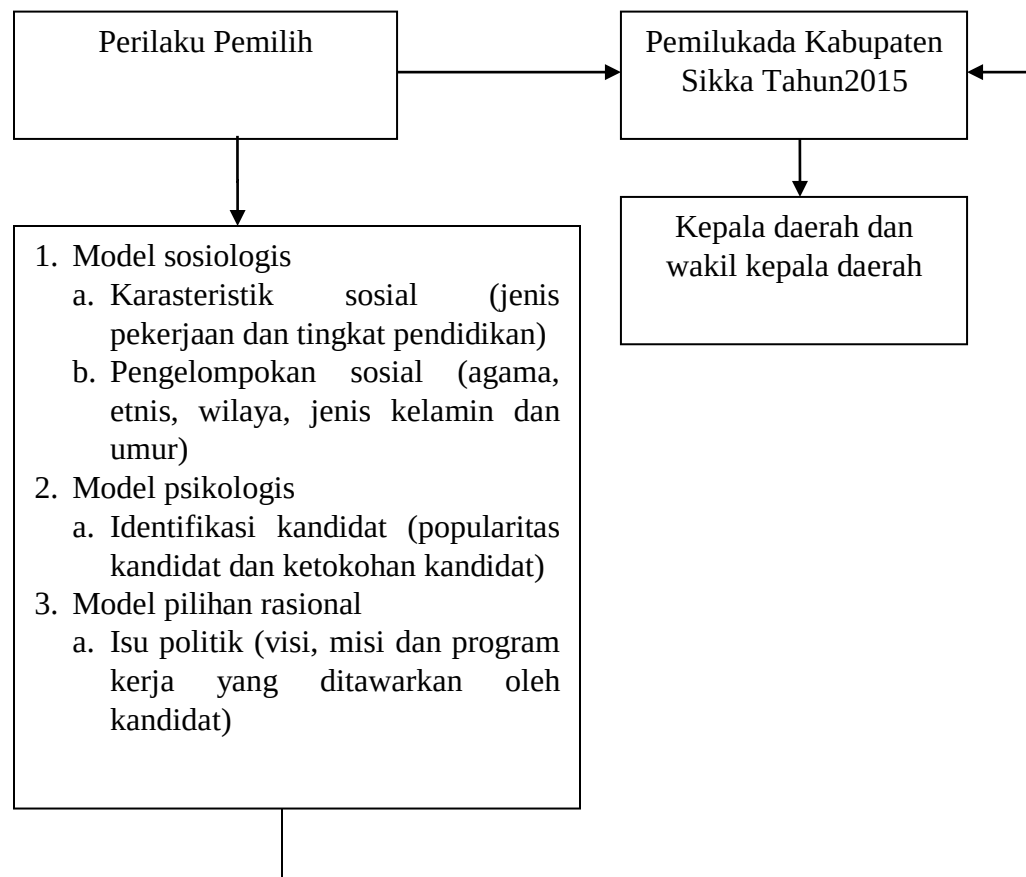
2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pembiasan fokus penelitian yang akan mengakibatkan penelitian tidak fokus. Sebagai alur berpikir pada penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Pemilukada merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah. Berbeda dengan sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya dipilih oleh legislatif. Pemilukada membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapapun untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Dalam konteks pemilukada, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek politik, akan tetapi sebagai subjek.

Partisipasi aktif dan kebebasan pemilih tanpa dimanipulasi dan intimidasi oleh kekuatan politik manapun merupakan parameter terwujudnya nuansa perpolitikan yang demokratis di setiap perhelatan pemilukada. Rakyat perlu diberi kemerdekaan berekspresi untuk menentukan sikap politiknya, karena rakyat yang tahu siapa kandidat atau calon pemimpin yang dapat dipercaya dan berkualitas untuk memimpin daerahnya. Kekritisan dan rasionalitas pemilih menjadi kunci lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas.

Dalam konteks pemilukada Kabupaten Sikka tahun 2018, perilaku pemilih dapat diamati melalui model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Untuk lebih jelas alur pikir peneliti dapat digambarkan dengan bagan berikut dibawah ini:



Berangkat dari konsep-konsep yang digunakan, yang menjelaskan atau mendeskripsikan kerangka pikir yang dibangun. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Model sosiologis yaitu karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.
- b. Model psikologis yaitu identifikasi kandidat mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.
- c. Model pilihan rasional yaitu isu politik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.